KURIKULUM 2013 DAN KESIAPAN FKIP UNIVERSITAS SRIWIJAYA DALAM IMPLEMENTASINYA

Sofendi, M.A. Ph.D.
Dekan FKIP Universitas Sriwijaya

Abstrak

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pendidikan yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Dalam implementasinya, Pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah, melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Selain itu, Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait serta adanya pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang melibatkan lembaga penyelenggara tingkat pendidikan (LPTK), yaitu Perguruan Tinggi yang orientasinya pada dunia pendidikan seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya (FKIP Unsri). Implementasi kurikulum 2013 menuntut FKIP Unsri sebagai LPTK harus mempersiapkan agar lulusannya dapat menerapkan kurikulum 2013 tersebut dengan sebenarnya sehingga visi pendidikan Indonesia dapat terwujud. Dalam hal ini FKIP Unsri melakukan beberapa kesiapan, yaitu kualifikasi dosen, kualifikasi tenaga kependidikan, dan pengembangan sarana-prasarana terutama penggunaan IT dan ICT.

Kata kunci : Kurikulum 2013, FKIP, Implementasi.

Pendahuluan

Pendidikan nasional sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Makna manusia yang berkualitas, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter (Kemendikbud, 2012).

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang jaman.Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum, yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi

pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Kemendikbud, 2012).

Secara konseptual, kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan.Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (Kemendikbud, 2012).

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Untuk mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik "menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab" (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional maka pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang.Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Oleh karena itu, konten pendidikan yang mereka pelajari tidak semata berupa prestasi besar bangsa di masa lalu tetapi juga hal-hal yang berkembang pada saat kini dan akan berkelanjutan ke masa mendatang. Berbagai perkembangan baru dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik yang dihadapi masyarakat, bangsa dan umat manusia dikemas sebagai konten pendidikan. Konten pendidikan dari kehidupan bangsa masa kini memberi landasan bagi pendidikan untuk selalu terkait dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, kemampuan berpartisipasi dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, dan memosisikan pendidikan yang tidak terlepas dari lingkungan sosial, budaya, dan alam. Lagipula, konten pendidikan dari kehidupan bangsa masa kini akan memberi makna yang lebih berarti bagi keunggulan budaya bangsa di masa lalu untuk digunakan dan dikembangkan sebagai bagian dari kehidupan masa kini. Atas dasar pikiran itu maka konten pendidikan yang dikembangkan dari warisan budaya dan kehidupan masa kini perlu diarahkan untuk memberi kemampuan bagi peserta didik menggunakannya bagi kehidupan masa depan terutama masa dimana dia telah menyelesaikan pendidikan formalnya. Dengan demikian sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menjadi konten pendidikan harus dapat digunakan untuk kehidupan paling tidak satu sampai dua dekade dari sekarang. Artinya, konten pendidikan yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan dan dikembangkan dalam kurikulum harus menjadi dasar bagi peserta didik untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan kehidupan mereka sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warganegara yang produktif serta bertanggungjawab di masa mendatang (Kemendikbud, 2012).

Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang

menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP nomor 19 tahun 2005).

Kurikulum dalam dimensi proses adalah realisasi ide dan rancangan kurikulum menjadi suatu proses pembelajaran. Guru adalah tenaga kependidikan utama yang mengembangkan ide dan rancangan tersebut menjadi proses pembelajaran. Pemahaman guru tentang kurikulum akan menentukan rancangan guru (Rencana Program Pembelajaran/RPP) dan diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Peserta didik berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi pengalaman langsung peserta didik. Apa yang dialami peserta didik akan menjadi hasil belajar pada dirinya dan menjadi hasil kurikulum. Oleh karena itu proses pembelajaran harus memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi hasil belajar yang sama atau lebih tinggi dari yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan.Kurikulum berbasis kompetensi adalah "*outcomes-based curriculum*" dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik.Dewasa ini, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda, misalnya pada kasus-kasus perkelahian massal. Walaupun belum ada kajian ilmiah bahwa kekerasan tersebut bersumber dari kurikulum, namun beberapa ahli pendidikan dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif dan keterkungkungan peserta didik di ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu direorientasi dan direorganisasi terhadap beban belajar dan kegiatan pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan ini (Kemendikbud, 2012).

Berbagai elemen masyarakat telah memberikan kritikan, komentar, dan saran berkaitan dengan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Beban belajar ini bahkan secara kasatmata terwujud pada beratnya beban buku yang harus dibawa ke sekolah. Beban belajar ini salah satunya berhulu dari banyaknya mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu kurikulum pada tingkat sekolah dasar perlu diarahkan kepada peningkatan 3 (tiga) kemampuan dasar, yakni baca, tulis, dan hitung serta pembentukan karakter. Berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, manipulasi, termasuk masih adanya kecurangan di dalam Ujian Nasional/UN menunjukkan mendesaknya upaya menumbuhkan budaya jujur dan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran di dalam satuan pendidikan. Maka kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai kejujuran pada peserta didik.
Pada saat ini, upaya pemenuhan kebutuhan manusia telah secara nyata mempengaruhi secara negatif lingkungan alam. Pencemaran, semakin berkurangnya sumber air bersih, adanya potensi rawan pangan pada berbagai belahan dunia, dan pemanasan global merupakan tantangan yang harus dihadapi generasi muda di masa kini dan di masa yang akan datang. Kurikulum seharusnya juga diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan alam dan menumbuhkan kemampuan untuk merumuskan pemecahan masalah secara kreatif terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan pangan (Kemendikbud, 2012).

Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai, mutu pendidikan Indonesia harus terus ditingkatkan. Hasil studi PISA (Program for International Student Assessment), yaitu studi yang memfokuskan pada literasi bacaan, matematika, dan IPA, menunjukkan peringkat Indonesia baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. Hasil studi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking amat rendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang komplek, (2) teori, analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan (4) melakukan investigasi. Hasil studi ini menunjukkan perlu ada perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga negara untuk berperanserta dalam membangun negara pada masa mendatang, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pendidikan yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 diperuntukan bagi semua tingkat pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Dalam implementasinya, Pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah,melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional (Kemendikbud, 2012). Selain itu, Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait serta adanya pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang melibatkan lembaga penyelenggara tingkat pendidikan (LPTK), yaitu Perguruan Tinggi yang orientasinya pada dunia pendidikan seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya (FKIP Unsri).

Implementasi kurikulum 2013 menuntut FKIP Unsri sebagai LPTK harus mempersiapkan agar lulusannya dapat menerapkan kurikulum 2013 tersebut dengan sebenarnya sehingga visi pendidikan Indonesia dapat terwujud. Berdasarkan kaitan FKIP sebagai LPTK dan implementasi kurikulum 2013, maka dalam makalah ini akan membahas tentang kurikulum 2013 dan peranannya bagi kemajuan pendidikan bangsa, FKIP Unsri sebagai LPTK dan penyelenggara kurikulum 2013, dan kesiapan FKIP Unsri dalam rangka implementasi kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 dan Peranannya bagi kemajuan pendidikan bangsa

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pendidikan Indonesia yang direorientasi dan direorganisasi terhadap beban belajar dan kegiatan pembelajaran sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat masa kini. Kurikulum ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 diperuntukan bagi semua tingkat pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA.

Awal sosialisasi kurikulum 2013, implemtasinya mendapatkan respon dari masyarakat baik yang menerima maupun menolak. Alasan penolakan terhadap kurikulum 2013 tidak hanya datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), namun juga dari berbagai institusi dan elemen masyarakat. Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Guntur Ismail mengatakan jika dasar penolakan yang sangat substansi, yaitu Kurikulum 2013 dilaksanakan tanpa uji coba. Sebelum diimplementasikan, rancangan sebuah kurikulum perlu diuji dan disosialisasikan secara terbuka di forum akademik, yang juga melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi serta kapasitas menilai, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat pelaku pendidikan. Forum terbuka adalah amat penting, yang mempunyai tujuan selain guna menampung pemikiran yang komprehensif juga untuk membangun pemahaman bersama hingga mengundang komitmen semua komponen masyarakat, khususnya yang akan

terlibat langsung di dalam implementasi. Substansi kedua adalah ketidaksiapan Sekolah dan Guru. Langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan sebuah kurikulum adalah menyiapkan guru, sarana dan prasarana serta infrastruktur pendidikan yang tepat. Menyiapkan guru dalam hal ini bukan sekedar menyiapkan keterampilan dalam pengetahuan, namun lebih penting adalah menyiapkan sosok guru yang mumpuni. "Rancangan Kurikulum 2013 mengambil konsep integratif-tematik yang menunjukkan terdapatnya perubahan mendasar pada struktur kurikulum hingga pola penugasan guru". Setidaknya, sejumlah mata pelajaran akan diintegrasikan menjadi satu mata pelajaran. Konsep ini membutuhan guru yang menguasai sejumlah mata pelajaran (yang digabungkan) serta mumpuni dalam mengajar berbasiskan pada tematik (yang telah ditentukan), yang merujuk pada lingkungan sekolah. Untuk terlaksananya konsep ini, pengetahuan dan kapasitas guru yang ada pada saat ini cukup jauh dari memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, akan terdapat permasalahan pada tidak sedikit jumlah guru dengan "kompetensi" mata pelajaran yang dikeluarkan dari dalam struktur Kurikulum 2013. Substansi ketiga adalah Ketidaksiapan Materi. Hingga limit waktu penerapan yang menyisakan waktu sekira 50 hari buku babon untuk guru dan buku siswa belum jadi bahkan belum dicetak. Jika kurikulum harus dilaksanakan pada 15 Juli 2013, maka pelatihan guru harus segera dilaksanakan Mei, namun karena anggaran belum disetujui DPR dan buku babon belum dicetak tentu saja tak mungkin melakukan pelatihan guru (Harahap, 2013). Ketiga alasan penolakan ini wajar untuk ditanggapi dalam hal mengurangi dampak minimal ketidakberhasilan implementasi kurikulum. Menanggapi permasalahan terhadap tiga alasan penolakan ini sebenarnya dalam kurikulum 2013 memiliki strategi dalam implementasinya.

Berdasarkan strategi implementasi kurikulum 2013, salah satu yang dilaksanakan adalah pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan/PTK. Pelatihan PTK adalah bagian dari pengembangan kurikulum. Pelatihan PTK disesuaikan dengan strategi implementasi yaitu: Tahun pertama 2013 sampai tahun 2015 ketika kurikulum sudah dinyatakan sepenuhnya diimplementasikan. Strategi pelatihan dimulai dengan melatih calon pelatih (Master Trainer) yang terdiri atas unsur-unsur, yaitu Dinas Pendidikan, Dosen, Widyaiswara, guru inti nasional, pengawas dan kepala sekolah berprestasi. Langkah berikutnya adalah melatih *master teacher* yang terdiri dari guru inti, pengawas dan kepala sekolah. Pelatihan yang bersifat masal dilakukan dengan melibatkan semua guru kelas dan guru mata pelajaran di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK.Dalam implementasinya, Pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah, melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Selain itu Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait (Kemendikbud, 2012). Terkait dengan strategi tersebut dibutuhkan perguruan tinggi, seperti Universitas Sriwijaya sebagai penyelenggara pelatihan pendidikan, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

FKIP Unsri sebagai LPTK dan kesiapannya terhadap implementasi kurikulum 2013

FKIP merupakan salah satu fakultas di Universitas Sriwijaya yang memiliki orientasi pada bidang pendidikan sehingga FKIP menjadi LPTK bagi ketersediaan guru di Sumatera Selatan. Universitas Sriwijaya (Unsri) menetapkan visi kelembagaannya berdasarkan visi Unsri. Visi Unsri ialah "Menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni pada tahun 2025." Beranjak dari visi Unsri ini, FKIP Unsri merumuskan visinya, yakni "FKIP Unsri pada dasawarsa kedua abad ke-21

merupakan lembaga yang unggul dalam pengembangan SDM, riset, informasi, dan inovasi kependidikan."FKIP Unsri memiliki misi untuk menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan Pendidikan yang menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan dan tenaga ahli yang profesional serta mampu bersaing secara global;Penelitian di bidang kependidikan dan ilmu murni yang menghasilkan informasi dan pembaharuan kependidikan; danPengabdian yang berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.FKIP Unsri bertujuan untuk menghasilkanLulusan yang berkualitas dan profesional dengan masa studi tepat waktu;Lulusan yang dapat memenuhi tuntutan dunia kerja, khususnya dalam bidang kependidikan;Lulusan yang mampu mengadakan penelitian dan menerapkan hasilnya;Karya penelitian dalam bidang ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan informasi (ipteksi) yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam bidang pendidikan; danKarya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hubungan yang sinergis antara FKIP Unsri, lembaga lain, dan masyarakat (*stakeholders).*

Ditilik dari jumlah program studi, jumlah dosen dan tenaga kependidikan, serta jumlah mahasiswa, FKIP Unsri merupakan fakultas terbesar dibandingkan darisembilan fakultas lainnya di lingkungan Unsri. Posisi ini menuntut pimpinan yang mempunyai kemampuan operasional yang handal, utamanya dalam menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi sebagai ujung tombak pelayanan kepada mahasiswa.Secara khusus kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman pimpinan terhadap tata kerja antar unit dalam tingkat fakultas. Selain itu, Dekan FKIP juga dituntut untuk mampu memberdayakan segenap unsur-unsur organisasi fakultas untuk berperan dan berfungsi sesuai dengan paparan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Tuntutan ini telah dilaksanakan oleh Dekan FKIP Unsri dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang merupakan penjabaran secara detail dari visi dan misi, tujuan FKIP. Dalam penyusunan Renstra dan Renop Dekan melibatkan unsur-unsur senat fakultas, jurusan, program studi, tenaga kependidikan yang relevan, alumni, dan pemangku kepentingan. Dekan melalui kemahiran managerial telah mengarahkan unsur-unsur tersebut berfungsi secara optimal sampai akhirnya diperoleh renstra dan renop yang menjadi panduan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi masing-masing jurusan dan program studi.

Dekan FKIP Unsri dengan dibantu oleh tiga pembantu dekan juga telah mengarahkan jurusan dan program studi serta unit-unit yang ada untuk mengembangkan renstra dan renop masing-masing. Dalam implementasinya Dekan telah berhasil memberdayakan masing-masing unit seperti Pembantu Dekan, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, UPM, UPPG, UPMS dan Tata Usaha untuk bekerja dengan mengacu pada renstra dan renop sehingga sinergis untuk mewujudkan kualitas pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi.

Dampak dari sinergi tersebut ialah meningkatnyakualitas dosen dan tenaga kependidikan, dan pelayanan pembelajaran.Semua unit melaksanakan tugasnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang telah ditentukan dalam Analisis jabatan yang menjadi ketetapan Rektor sebagai pedoman kerja. Sinergi dalam pelaksanaan kepemimpinan diterapkan melalui koordinasi kerja antar unit yang ada di FKIP, antara lain pemanfaatan fasilitas belajar dan sarana lainnya. Selanjutnya dalam peningkatan kualitas SDM dosen dan mahasiswa FKIP melakukan koordinasi dengan unit yang terkait, yaitu melalui Lembaga penelitian dan Lembaga pengabdian pda masyarakat, Unit Penjaminan Mutu baik Fakultas dan Juga Universitas dan UPPG untuk

meningkatkan kualitas mahasiswa dalam pembekalan pengalaman pembelajaran dengan cara menerjunkan para mahasiswa dan dosen pembimbing pada sekolah sekolah.

Idealnya rata-rata masa studi dan IPK mahasiswa FKIP Unsri ialah 4 tahun dan 3,25. Sampai tahun akademik 2011/2012 rata-rata masa studi lulusan FKIP Unsri tergolong wajar karena masih di bawah 5 tahun (rerata 4.38). Demikian pula dengan rata-rata IPK lulusan dapat dikategorikan sangat memuaskan dengan angka diatas 3,00. Rata-rata IPK nilai ini merupakan angka minimal yang ditetapkan oleh sebagian stakeholder dalam rekrutmen tenaga pendidikan. Dengan IPK rata-rata 3,20, mahasiswa diperkirakan tidak akan menghadapi kendala yang berartidalam mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru) pada waktunya nanti yang mempersyaratkan IPK minimum 2,75.Jika dibandingkan dengan tahun-tahun akademik sebelumnya, gejala yang telihat ialah terdapatpenurunan rata-rata masa studi dan kenaikan IPK. Keduanya diduga terjadi karena sejak empat tahun terakhir kemampuan mahasiswa baru (*input*) yang terseleksi cenderung lebih baik sebagai dampak dari persaingan yang lebih ketat. Rata-rata rasio calon mahasiswa yang diterima dan yang mendaftar mencapai 1:20. Animo lulusan SMA untuk berkarir dalam bidang pendidikan akhir-akhir ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan, yakni FKIP Unsri telahmenjadi pilihan pertama bagi lulusan sekolah tersebut. Selanjutnya, perubahan kurikulum FKIP Unsri juga menyumbang keberhasilan di atas. Beban studi yang sebelumnya berkisar 156-160 SKS dalam tiga tahun terakhir telah direvisi antara 144-146 SKS. Pengurangan beban studi membuat mahasiswa memiliki waktu yang memadai untuk menyelesaikan studi mereka.

Perubahan kurikulum yang dilakukan FKIP Unsri sebenarnya telah mengarah kepada kurikulum 2013. Alasan dibuat kurikulum 2013 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK adalah karena kurikulum yang berlaku terlalu padat dan tidak efisien. Banyak materi yang hanya membebani siswa dan tak banyak digunakan dalam kehidupan nyata siswa. Hal serupa terjadi pada kurikulum FKIP sebelumnya. Dengan perubahan beban studi dari 160 sks menjadi 145 sks mengakibatkan lama studi dan kemampuan yang dimiliki mahasiswa FKIP menjadi lebih baik.

Seperti diuraikan di atas, FKIP Unsri masih memiliki peluang untuk menurunkan masa studi dan meningkatkan IPK lulusan ke arah ideal melalui berbagai upaya. Upaya yang telah dilakukan untuk pengembangan dan peningkatan hasil capaian tersebut adalahmeningkatkan kualifikasi akademik tenaga pengajar dari S2 ke S3; meningkatkan kompetensi dosen S2 dan S3 melalui pelatihan, workshop, magang;menambah sarana akses informasi ilmiah baik berupa buku, dan juga sarana internet (tersedia hot-spot) baik dalam kelas dan juga di luar kelas dalam kampus;melakukan diskusi-diskusi secara intensif secara formal maupun informal, serta melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen, dimana mahasiswa dapat mengambil bagian untuk tugas akhir;menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran;meningkatkan peran unit penjaminan mutu FKIP Unsri dalam memonitor dan mengevaluasi pembelajaran;meningkatkan kualitas pelayanan penasehat akademik kepada mahasiswa; dan meningkatkan kualitas pelayanan pembimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing.

Dalam rangka implementasi kurikulum 2013, FKIP Unsri dituntut menghasilkan lulusan yang mampu bekerja dan memiliki kompetensi sesuai dengan yang dikehendaki kurikulum 2013. Oleh sebab itu, FKIP Unsri melakukan kesiapan dalam hal kualifikasi dosen, kualifikasi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Kualifikasi Dosen

Jumlah dosen FKIP Unsri sampai akhir tahun akademik 2011/2012 sebanyak 201 orang (FKIP, 2011). Jumlah seluruh mahasiswa pada tahun akademik yang sama sebanyak 4.730 orang. Dari kedua informasi maka jika dihitung rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa maka besaran rasio tersebut mencapai 1:23. Secara kuantitatif rasio ini termasuk ideal. Tetapi jika dicermati masing-masing rasio dari 14 program yang ada, pada sejumlah program studi rasio dosen dan mahasiswa belum ideal. Program studi yang masuk ke dalam kategori ini yakni Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Teknik Mesin. Kekurangan jumlah dosen pada program studi tersebut menyebabkan beban kerja dosen pada bidang pengajaran menjadi tinggi, dosen kurang mendapat kesempatan untuk melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jika tidak ada kebijakan yang bersifat akseleratif, maka program studi tersebut akan mengalami kekurangan dosen dan berdampak pada pelayanan kepada mahasiswa.

Dalam UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, dinyatakan dosen di perguruan tinggi sekurang-kurangnya berpendidikan strata dua (S2). Jika data yang ada pada masing-masing program studi FKIP Unsri dicermati diperoleh kesimpulan (a) jumlah dosen yang berkualifikasi stratra satu (S1) sebesar 3%, (b) dosen yang berkualifikasi S2 sebanyak 80%, dan dosen yang berkualifikasi strata tiga (S3) sebanyak 17% dari keseluruhan dosen tetap. Keberadaan dosen-dosen yang masih berkualifikasi S1 secara kuantitatif sudah berkurang dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Dosen-dosen dimaksud dalam waktu lima tahun ke depan akan segera memasuki masa pensiun. FKIP Unsri telah memberi kesempatan kepada dosen yang berkualifikasi S1 untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 namun karena faktor usia yang mendekati usia pensiun, sebagian dari mereka tidak termotivasi untuk menempuh studi lanjut.

FKIP Unsri telah memiliki sistem pengembangan karir dosen yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan, yakni UU Guru dan Dosen. Pengembangan karir dosen difokuskan pada peningkatan kinerja yang berdampak pada kenaikan jabatan akademik. Idealnya jabatan fungsional dosen adalah guru besar. Melalui upaya ini pada gilirannya penghasilan dosen pun akan meningkat. Data sampai tahun akademik 2011/2011 menunjukkan 4,4% dosen FKIP Unsri telah mencapai jabatan akademik guru besar, 44% berjabatan akademik lektor kepala, dan sisanya berjabatan lektor dan asisten. Jika dilihat dari data ini maka setengah dari jumlah dosen belum berjabatan lektor kepala mengingat masa kerja dan angka kredit belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan. Pengembangan karir dosen yang telah dilakukan yang telah dilakukan antara lain:memfasilitasi dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara optimal sebagaimana dituntut oleh beban kerja dosen (BKD);memfasilitasi dosen dalam melaksanakan pokok-pokok yang telah dituliskan di dalam rencana BKD supaya dari kegiatan ini dosen dapat mengumpulkan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan akademik. Kegiatan-kegiatan dimaksud yakni, dalam bidang pengajaran (membantu penulisan buku ajar, memberikan hibah pengajaran bagi dosen yang ingin melakukan inovasi pembelajaran), dalam bidang penelitian (mengikuti seminar sebagai pemakalah ataupun peserta di dalam dan luar negeri, mengikuti lokakarya sebagai nara sumber atau peserta, mengikuti pemagangan di perguruan tinggi lain, membantu publikasi ilmiah), dan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (melakukan lokakarya penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat, menginformasikan hibah yang tersedia baik di lingkungan Unsri, Dikti, atau kerja sama dengan pemerintah daerah).

Kualifikasi Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan di lingkungan FKIP Unsri jika dilihat dari status kepegawaian dinilai masih kurang. Jumlah pegawai yang berstatus PNS saat ini mencapai 60% dan untuk menutupi kekurangannya FKIP memperkejakan pegawai honorer. Memperhatikan kombinasi ini maka jumlah tenaga kependidikan dinilai cukup.

Jika ditinjau dari kualifikasi tenaga kependidikan, maka terdapat ketidakseimbangan. Sebagian besar tenaga pendidikan yang ada adalah tenaga administratif yang berkualifikasi lulusan SMA dan strata satu. Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pustakawan, analisis, keuangan, dan programer masih kurang.

Sarana dan prasarana

Ketersediaan prasarana, terutama gedung dan ruang kuliah, dirasakan masih kurang. Saat ini FKIP di Indralaya memiliki kampus seluas 18.000 m^2 yang digunakan untuk gedung dan halaman seluas 13.000 m^2 dan kebun botani seluas 5.000 m^2. Bangunan gedung di kampus ini terdiri dari gedung kuliah, dekanat, laboratorium, laboratorium *microteaching*, ruang baca, mushola, dan gedung serba guna. Gedung kuliah berjumlah 4 buah yang masing-masing terdiri dari 2 lantai dengan 45 ruang. Ketiga gedung ini mempunyai luas 3.000 m^2 dengan rincian 1.599 m^2 ruang kuliah, 117,5 m^2 ruang dosen, 125,4 m^2 ruang administrasi, 160 m^2 ruang baca, dan 1.665 m^2 ruang kegiatan lain. Pada tahun akademik 2012/2013 ini FKIP Unsri menambah satu gedung baru lagi dengan luas bangunan 4.104 m^2 yang terdiri dari tiga lantai. Untuk lantai dasar terdiri dari 24 ruang dosen dan program studi, lantai 2 terdiri dari 12 ruang kuliah dan lantai 3 terdiri dari 12 ruang kuliah.Gedung lain adalah gedung dekanat yang merupakan pusat administrasi fakultas. Gedung ini terdiri dari 3 lantai, 22 ruang dengan luas keseluruhan 1.506 m^2 yang digunakan untuk ruang Dekan, PD I, PD II, PD III, Kabag TU, Kasubbag Pendidikan, Kasubbag Umum dan Perlengkapan, Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan, Kasubbag Kemahasiswaan, Komputer, Guru Besar, Rapat, Pengadaan, Mushola, Satpam, Dharma Wanita, dan Dapur. Di samping gedung dekanat juga sudah berdiri sebuah gedung serba guna yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pelepasan alumni baru, dan kegiatan kemahasiswaan.

Selanjutnya, gedung laboratorium terdiri dari empat ruang dengan luas keseluruhan adalah 150 m^2, dengan rincian 100 m^2 untuk ruang praktikum dan 20 m^2 untuk gudang dan administrasi. Prasarana lainnya adalah laboratorium *microteaching* dan mushola. Laboratorium *micro-teaching* terdiri dari 3 ruang dengan luas keseluruhan 60 m^2 dan mushola merupakan bangunan dengan luas 48 m^2. Gedung laboratorium IPS terdiri dari 4 ruang dengan luas keseluruhan 550 m^2.

Penggunaan ICT di FKIP mengacu pada kebijakan umum Unsri. Sekarang ini akses informasi akademik di FKIP sudah menggunakan sistem on-line dengan menggunakan SIMAK (Sistem Informasi Akademik) yang dikelola oleh Pusat Komputer (PUSKOM) di tingkat Universitas, yang admin-nya ada pada setiap fakultas. Akses informasi bisa sampai ke tingkat Jurusan/Program Studi. Mulai tahun akademik 2008 mahasiswa melakukan registrasi secara on-line, mengisi KRS dan KHS secara on-line, pendaftaran wisuda juga dilakukan secara on-line. Dalam ketersediaan akses sambungan internet, ada yang menggunakan kabel (memakai IP addess), ada juga yang menggunakan jaringan nirkabel dengan hot spot yang tersebar, dan dapat digunakan oleh mahasiswa secara gratis sampai ke tingkat Jurusan/Program Studi. Di samping itu, informasi kepada mahasiswa maupun masyarakat luas diberikan melalui website, baik Fakultas (www.fkip.unsri.ac.id) maupun Universitas (www.unsri.ac.id). Hingga saat ini Unsri dan FKIP telah mengembangkan secara mandiri 8 (delapan) sistem aplikasi versi intranet, yakni:

(a) Sistem Informasi Akademik Universitas dan Sistem Informasi Manajemen Fakultas/Jurusan/Program Studi.
(b) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(c) Sistem Informasi Manajemen Keuangan
(d) Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris
(e) Sistem Informasi Manajemen Penelitian
(f) Sistem Informasi Manajemen Pengabdian
(g) Sistem Informasi Manajemen Program Pengalaman Lapangan
(h)Sistem Informasi Manajemen Program Pascasarjana.

Pemanfaatan IT & ICT juga diimplementasikan dalam perkuliahan dengan cara melakukan pembinaan terhadap komunitas IT & ICT. Pengimplementasian ini dimulai dari tingkat Universitas, fakultas, jurusan dan program studi dan saat ini FKIP telah membangun Web FKIP dengan alamat: www.unsri.ac.id. atau www.fkip.unsri.ac.id

Rencana pengembangan prasarana dalam lima tahun mendatang

Rencana pengembangan prasarana dalam lima tahun kedepan antaralain pada tahun 2013 ini akan dibangun laboratorium MIPA 3 lantai dan pusat kegiatan mahasiswa. Pada tahun 2014 akan dibangun laboratorium IPA (Sejarah, Ekonomi, PKn), laboratorium BK, Laboratorium PGSD, Laboratorium Penjaskes, Laboratorium PGPAUD.

Rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang adalah menyediakan akses informasi kepada sivitas akademika ataupun kepada *stakeholders* secara mudah, murah, dan cepat. Pemanfaatan TIK yang saat ini berfokus pada hal-hal yang bersifat akademik akan terus dikembangkan sehingga menyangkut hal-hal tentang keuangan, sarana/prasarana, dan kepegawaian. Penambahan jaringan, bandwitch, dan juga hotspot yang semakin luas jangkauannya akan terus-menerus diupayakan.

Penutup

Kurikulum 2013 dikembangkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan indonesia sehingga peserta didik mampu memahami informasi yang komplek, teori, analisis dan pemecahan masalah, mampu memakai alat, prosedur dan pemecahan masalah serta melakukan investigasi. Pada masa kini, kurikulum 2013 menuntut penggunaan IT dan ICT sehingga peserta didik mampu mengembangkan kompetensinya. Dalam implementasinya, kurikulum memerlukan keterkaitan beberapa pihak, salah satunya adalah lembaga penyelenggara tingkat kependidikan (LPTK), yaitu FKIP. Universitas Sriwijaya, melalui FKIPnya diharapkan mampu mendukung implementasi kurikulum 2013 ini. Dalam hal ini FKIP Unsri melakukan beberapa kesiapan, yaitu kualifikasi dosen, kualifikasi tenaga kependidikan, dan pengembangan sarana-prasarana terutama penggunaan IT dan ICT.

Referensi

FKIP. 2011. *Pedoman Akademik*. Palembang: Nuriz

Harahap RF. 2013. 3 Alasan Penolakan Kurikulum 2013. Diunggah dari *http://okezone.com* tanggal 22 mei 2013.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2012. *Dokumen Kurikulum 2013*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.